

SEJARAH WAKAF DALAM ISLAM

Wakaf di zaman Islam dimulai bersamaan dengan kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari *Banī al-Najjar*. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Masjid al-Nabawī yang dibangun di atas tanah anak yatim dari *Banī al-Najjar* setelah dibeli oleh Rasūl Allāh SAW dengan harga delapan ratus dirham.¹ Dengan demikian, Rasūl Allāh telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Para sahabat juga telah membantu beban dalam menyelesaikan pembangunan ini.

Wakaf lain yang dilakukan pada masa Rasūl Allāh SAW. adalah wakaf tanah *khaybar* dari 'Umar bin al-Khaṭṭāb. Tanah ini sangat disenangi 'Umar bin al-Khaṭṭāb karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasihat kepada Rasūl Allāh tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu, maka Rasūl Allāh menyuruh 'Umar bin al-Khaṭṭāb menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan 'Umar bin al-Khaṭṭāb pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah *khaybar* yang terlaksana pada tahun ketujuh hijriyah.

Hal yang sama juga terjadi pada perkebunan *bayruha'* yang diwakafkan oleh Abū Ṭalḥah, padahal perkebunan itu adalah harta yang sangat dicintainya. Maka turunlah surat Ali-'Imrān ayat 92:

¹Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifah, 2005), 6. Baca: John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press, 1995), 3.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.²

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Ayat inilah yang membuat Abū Ṭalḥah semangat mewakafkan perkebunannya. Rasūl Allāh SAW. telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu untuk keluarga dan keturunannya. Maka Abū Ṭalḥah mengikuti perintah Rasūl Allāh tersebut. Di antara keluarga yang mendapat wakaf dari Abū Ṭalḥah adalah Ḥasan bin Ṭhābit. Namun ia menjual bagiannya pada masa pemerintahan Mu'awiyah, sehingga dikatakan kepadanya, “Apakah aku akan menjual satu gantang kurma dengan satu gantang dirham (uang perak)?” Kalau tanah ini menjadi wakaf bagi keluarga dan keturunan Abū Ṭalḥah, maka tidak mungkin akan dijual, kecuali menurut pendapat orang yang mengatakan “Sesungguhnya wakaf tetap dimiliki secara utuh oleh pemiliknya”. Akan tetapi pendapat yang kuat adalah tanah perkebunan tersebut merupakan wakaf bagi keluarga dan keturunannya, dengan demikian berarti mereka telah memilikinya, dan bukan wakaf yang mengikuti hukum dan syarat wakaf. Karena Rasūl Allāh SAW. dalam nasehatnya kepada Abū Ṭalḥah tidak berterus terang untuk mewakafkannya dan menjadikan hasilnya untuk keluarga dan keturunan Abū Ṭalḥah.³

Apa yang dilakukan ‘Umar bin Khaṭṭāb kemudian ditindaklanjuti oleh Abū Ṭalḥah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun *bayruḥā*. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabī SAW. lainnya, seperti Abū Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan anak keturunannya yang datang ke Mekah.

²Al-Qur’ān, 3 (Ali-‘Imrān): 92.

³Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 9.

‘Uthmān bin ‘Affān mewakafkan hartanya di Khaybar. ‘Alī bin Abī Ṭalīb mewakafkan tanahnya yang subur. Mu‘adh bin Jabbal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan *dār al-Anṣār*. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, ‘Abd. Allāh bin ‘Umar, Zubayr bin Awwām dan ‘Aishah istri Rasūl Allāh SAW.⁴

Wakaf menjadi berkembang pada masa dinasti Umayyah dan dinasti ‘Abbāsiyah. Semua orang pada saat itu berduyun-duyun mewakafkan hartanya, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi juga menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para staf, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa.⁵ Antusias masyarakat dalam berwakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai energi demi membangun solidaritas sosial dan menggairahkan perekonomian masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa besar manfaat wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik.⁶ Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, dan memelihara harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarganya.⁷

⁴Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 10.

⁵Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2006), 13. Baca: Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), 27.

⁶Pada masa ‘Umar bin al-Khaṭṭāb menjadi khalifah, ia mencatatkan wakafnya dalam akte wakaf dengan dipersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak itu banyak keluarga Nabī dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga. Baca: Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifah, 2005), 9.

⁷Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, 11.

Interest umat Islam terhadap masalah ini, menuntut didirikannya suatu lembaga khusus yang bergerak di bidang wakaf, baik untuk menampung harta wakaf maupun mengelolanya. Di samping itu, wakaf yang pada awal perjalanannya berlangsung tanpa adanya pengawasan atau intervensi dari pemerintah dalam pengembangannya, juga menuntut didirikannya lembaga khusus yang berfungsi mengawasi wakaf. Hal ini dimulai oleh para hakim di kota Baghdad dan di negara-negara Islam. Mereka berusaha mengawasi dan memiliki kinerja para pengelola wakaf, hingga – ketika menemukan kekurangan atau kelalaiannya – mereka akan segera mengingatkan untuk kemudian meluruskannya.⁸

Pada masa dinasti ‘Umayyah, tepatnya pada kekuasaan khalifah Hishām bin ‘Abd. Al-Mālik, yang menjadi hakim Mesir adalah Tawbah bin Ghar al-Hadramī. Ia menaruh perhatian yang amat besar dalam mengembangkan potensi wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, hakim Tawbah mendirikan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.⁹

Wakaf di Mesir dan negara-negara Islam lain saat itu di bawah pengawasan hakim. Hakim bertugas mengawasi dan menjaga harta pokok wakaf dan menyalurkan keuntungannya kepada pihak yang berhak menerimanya. Jika *wāqif* (orang yang mewakafkan) telah menunjuk pihak tertentu untuk mengawasi harta wakafnya, maka

⁸Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Khalifah, 2005), 27.

⁹Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, 14. Baca: Muḥammad Amin ‘Alī, *Tarīkh al-Awqāf fī Misr fī ‘Asri Salathīn al-Mamālik* (Mesir: Dār al-Nadwah, t.tp.) 49.

hakim cukup mengawasi pihak yang telah ditunjuk oleh *waqif* tersebut. Jika tidak ada pihak yang mengawasinya, maka dalam hal ini hakim memegang langsung kendali sebagai pengawas. Pada masa Bani ‘Abbāsīyah, pimpinan lembaga wakaf disebut juga *Ṣadr al-Wuqūf*. Ia bertugas mengawasi pengelolaan wakaf dan menunjuk pihak-pihak tertentu untuk membantu pengawasan tersebut.¹⁰

Pada saat dinasti ‘Uthmānīyah menguasai daratan Arab, wakaf telah meluas dan mendapat sambutan dari para penguasa dan pimpinan lainnya. Sehingga mereka mendirikan lembaga khusus tentang pengaturan pengelolaan wakaf, pemaparan bentuk wakaf, dan teknis pendistribusiannya. Prinsip-prinsip yang di dalam undang-undang tersebut masih tetap dilaksanakan oleh lembaga-lembaga wakaf hingga sekarang.¹¹

Di antara peraturan wakaf yang dibuat di masa dinasti ‘Uthmānīyah adalah peraturan pengelolaan wakaf¹² yang mengatur pemilihan dan pengangkatan ketua lembaga, prosedur pemeriksaan dan evaluasi ketua baru kepada pendahulunya, mengatur perhitungan pengelola wakaf, mengatur pengoptimalan wakaf dengan mendirikan lembaga sosial, mengatur prosedur mendapatkan keuntungan dari harta wakaf, dan hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan pengaturan lembaga wakaf.¹³

Selain itu pada masa dinasti ‘Uthmānīyah, telah dibuat peraturan¹⁴ yang memuat pembagian macam-macam tanah, peraturan transaksi barang dan keuntungan wakaf. Pembagian-pembagian tersebut masih terus dilaksanakan sampai sekarang. Hal ini

¹⁰ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 28.

¹¹ Ibid.

¹² Peraturan ini dibuat pada tanggal 19 *jumād al-Akhir* 1280 H.

¹³ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 29.

¹⁴ Peraturan ini dibuat pada tanggal 19 *jumād al-Akhir* 1287 H.

menunjukkan bahwa undang-undang pengelolaan wakaf yang dibuat di Irak telah dipraktikkan, baik dari segi hukum-hukumnya maupun pengertian-pengertiannya.¹⁵

Pada masa dinasti Ayyūbiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan, hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi hak milik negara (*bayt al-māl*). Ketika Ṣalāh al-Dīn al-Ayyūbī memerintah Mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fāṭimīyah sebelumnya, meskipun menurut Islam hukum mewakafkan harta *bayt al-māl* masih beda pendapat di antara para ulama. Orang pertamakali yang mewakafkan tanah milik negara (*bayt al-māl*) kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah raja Nūr al-Dīn al-Shāhid¹⁶ dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ‘ulamā’ pada masa itu ialah Ibn al-Ishrūn dan didukung oleh para ‘ulamā’ lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh dengan argumentasi memelihara dan menjaga kekayaan negara. Dengan peristiwa ini, mewakafkan tanah negara kemudian menjadi tradisi setelah sebelumnya diharamkan.¹⁷

Ṣalāh al-Dīn al-Ayyūbī banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah *madhhab* al-Shāfi‘ī, madrasah *maddhab* al-Mālikī dan madrasah *madhhab* al-Ḥanafī dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian,¹⁸ seperti

¹⁵Peraturan ini dibuat pada tanggal 7 *Ramaḍān* 1273 H. Baca: Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), 29.

¹⁶Departemen Agama RI, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2004), 12.

¹⁷Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, 15. Baca: Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2004), 13.

¹⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, 12.

pembangunan madrasah *madhhab* al-Shāfi‘i di samping makam imām al-Shāfi‘i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau *al-fil*.

Dalam rangka mensejahterakan ‘ulamā’ dan kepentingan misi *madhhab* sunnī, Ṣalāh al-Dīn al-Ayyūbī menetapkan kebijakan bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para *fuqahā’* dan keturunannya. Wakaf juga menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyūbiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yakni *madhhab* sunnī dan mempertahankan kekuasaannya. Harta milik negara menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan *madhhab* sunnī dan menggusur *madhhab* Shi’ah yang dikembangkan oleh dinasti sebelumnya, yakni dinasti Faṭimīyah.¹⁹

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamlūk²⁰ sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Namun yang paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamlūk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama, seperti memelihara masjid dan madrasah.²¹ Hal ini dilakukan pertamakali oleh penguasa dinasti

¹⁹Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, 16.

²⁰Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamlūk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana di Haramayn, ialah Mekah dan Madinah, seperti kain Ka’bah (*qiswat al-ka’bah*). Sebagaimana yang dilakukan oleh raja Ṣāliḥ ibn al-Nāṣir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai *qiswat al-Ka’bah* setiap tahunnya dan mengganti kain makam Nabī Muḥammad dan mimbarinya setiap lima tahun sekali. Baca: Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan* (Jakarta: Direktorat Pemberayaan Wakaf, 2006), 17.

²¹Departemen Agama RI, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, 13.

Mamlūk ketika berhasil menaklukkan Mesir, yakni Sulayman Basha yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.²²

Sejarah perwakafan dalam Islam menurut penulis memberi pengaruh dan kontribusi sangat besar bagi pengembangan dan kemajuan perwakafan umat Islam. Sejak masa Rasūl Allāh, *khulafā' al-Rashidīn*, dan dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di negeri muslim, termasuk umat Islam di Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia.

Melihat wakaf secara historis, sesungguhnya umat Islam Indonesia dapat mengambil pelajaran betapa penting potensi dan peranan wakaf sebagai sumber ekonomi yang terus-menerus untuk menjamin berlangsungnya kesejahteraan di masyarakat. Wakaf sebagai nilai instrumental dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang memberi kehidupan bagi pengelolaanya dan masyarakat.

Hasil wakaf bila dikembangkan akan memberi manfaat, tidak saja dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah, sarana pendidikan dan kebutuhan sosial, tetapi bisa dimanfaatkan mengentaskan kemiskinan umat Islam di Indonesia. Sudah waktunya, tidak menunggu proses panjang lagi dengan melalui Badan Wakaf Indonesia perwakafan di Indonesia seharusnya dikembangkan, jangan hanya terbatas pada barang

²²Perkembangan berikutnya manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamlūk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundangan wakaf pada dinasti Mamlūk dimulai sejak raja al-Dāhir Bibers al-Bandaqri (1260-1277 M/658-676 H), dengan undang-undang tersebut raja al-Dāhir memilih hakim dari masing-masing empat *madhhab* sunnī. Pada masa al-Dāhir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategorie: pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramayn (fasilitas Mekah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Baca: Muḥammad Amin 'Alī, *Tarīkh al-Awqāf fī Miṣr fī 'Aṣri Salāṭīn al-Mamālik* (Mesir: Dar al-Nadwah, t.tp) 107.

pakai, tetapi juga berupa barang-barang menghasilkan. Pengembangan harta wakaf yang berupa barang menghasilkan menjadi wewenang *nāzir* (pengelola) wakaf, baik *nāzir* perorangan maupun yang bersifat organisasi dan badan hukum.

Imdad-Gresik.blogspot.com